

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Inspektorat Kota Pagar Alam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 4 seri D). Tahun 2014 jumlah PNS di Inspektorat Kota Pagar Alam 47 (Empat puluh tujuh) dengan rincian 5 (lima) orang pejabat struktural, 19 (sembilan belas) orang berstatus sebagai pejabat fungsional auditor dan selebihnya adalah staf.

Sarana yang tersedia adalah kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) buah, 6 (enam) buah kendaraan roda dua, Fasilitas untuk menyimpan arsip terdiri dari lemari besi sebanyak 2 (dua) buah, Filling Besi / Metal sebanyak 5 (lima) buah, Fasilitas Komputer P.C 10 (sepuluh) unit 6 (enam) unit dalam kondisi baik dan 4 (empat) unit dalam kondisi rusak, fasilitas Laptop/notebook sebanyak 4 (empat) unit dalam kondisi baik dan layak pakai yang kesemuanya sudah menjadi inventaris kantor.

Pembinaan karier pegawai dilakukan secara berjenjang. Untuk meningkatkan kompetensi para pegawai dijadwalkan mengikuti kursus – kursus maupun diklat. Kepada para pegawai juga diberi kesempatan seluas luasnya untuk meningkatkan jenjang pendidikan, baik melalui beasiswa yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah maupun atas biaya sendiri.

#### **B. ASPEK STRATEJIK**

Keberadaan Inspektorat Kota Pagar Alam adalah sangat strategis dalam Penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai Perda Nomor. 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025. Maka arah kebijakan dibidang pengawasan telah disebutkan secara jelas. Arah kebijakan tersebut adalah melaksanakan pengawasan dengan mengedepankan aspek pembinaan.

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Pagar Alam adalah SDM Aparat Pengawasan telah memiliki sertifikat auditor, adanya pedoman pengawasan

adanya kode etik auditor. Sedangkan kelemahan yang ada diantaranya SDM pengawasan dan auditor banyak yang memasuki usia pensiun, dukungan anggaran dan sarana prasarana kerja belum memadai, implementasi audit sesuai PKA dan KAK belum sepenuhnya dilaksanakan oleh auditor serta terbatasnya kesempatan auditor mengikuti diklat peningkatan kemampuan teknis dan kompetensi substansi.

Namun demikian peluang yang dimiliki Inspektorat Kota Pagar Alam memungkinkan Institusi ini untuk dapat bekerja secara optimal. Analisis peluang tersebut antara lain : political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam system manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional, Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis, perubahan paradigma pengawasan dimana aparat pengawasan sebagai mitra audit, semakin meningkatnya transparansi masyarakat sejalan dengan era demokratisasi, komitmen tinggi dari pimpinan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya good governance.

Keberadanaan Inspektorat Kota Pagar Alam untuk dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan profesional juga dapat terganggu. Hal tersebut dimungkinkan jika terjadi ancaman terhadap kinerja Inspektorat Kota Pagar Alam . Analisis ancaman yang mungkin terjadi adalah masih adanya pejabat yang memandang pengawasan sebagai wahana mencari kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi, dinamika perubahan manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada membenahan aspek perencanaan penganggaran dan pelaksanaan membenahan system pengawasan masih tertinggal serta reward kepada tenaga fungsional auditor belum memadai yang pekerjaannya mengandung resiko dan menuntut profesionalisme

Agar dapat menjadi penjamin mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kota Pagar Alam, maka telah ditetapkan beberapa strategi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan, profesionalisme dan independensi aparat pengawasan ;
2. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan ;
3. Percepatan penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan oeh auditor ;
4. Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan ;
5. Meningkatkan budaya pengawasan ;

6. Melakukan kerja sama yang bersifat horisontal antar instansi, karena mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel mensyaratkan adanya dukungan dari pihak – pihak tersebut

Strategi lain yang ditempuh adalah kerjasama dengan instansi vertikal dalam bidang pengawasan, seperti Inspektorat Provinsi, Irjen, BPKP dan BPK. Hal ini perlu mengingat sumberdaya yang ada di Inspektorat Kota Pagar Alam juga terbatas, baik dari aspek kompetensi APIP, dana, sarana dan prasarana. Strategi yang juga diperlukan adalah bekerjasama dengan masyarakat. Data dan informasi masyarakat yang akurat diharapkan mampu meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Pagar Alam dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan.

### **C. ORGANISASI INSPEKTORAT**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 4 seri D),

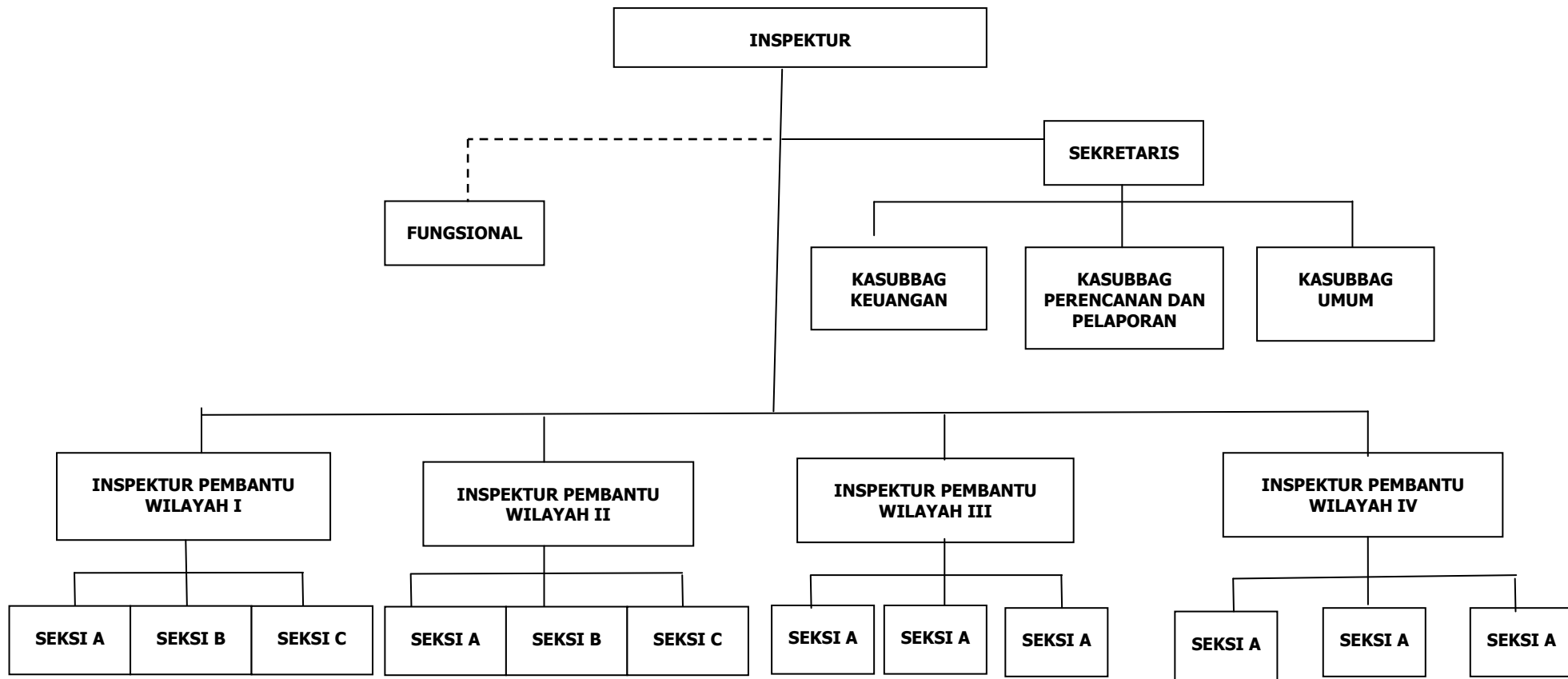
#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Kota Pagar Alam mempunyai tugas pokok : melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kelurahan..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya..

## 2. Struktur Organisasi



Catatan : Struktur ini berdasarkan PERDA No. 04 tahun 2010, namun dalam pelaksanaannya seksi – seksi sudah dihapus/tidak ada personilnya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam, maka struktur organisasi Inspektorat Kota Pagar Alam yaitu terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
  - a. Subbag Umum ;
  - b. Subbag Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah dan Aparatur;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan, Keuangan dan Asset.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah dan Aparatur; dan
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan, Keuangan dan Asset.
5. Inspektur Pembantu wilayah III, membawahi :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pembangunan ;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah dan Aparatur ; dan
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan,Keuangan dan Asset.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pembangunan ;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah dan Aparatur ; dan
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan, Keuangan dan Asset.

namun dalam kenyataannya struktur Organisasi inspektorat ialah mengacu PP 41 Tahun 2007 sehingga susunan sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Irban Wilayah I,Wilayah II,Wilayah III,Wilayah IV

**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Inspektorat Kota Pagar Alam telah menetapkan Rencana Strategik (Renstra) selama lima tahun, namun tetap dimungkinkan adanya penyesuaian – penyesuaian sesuai dengan dinamika arah pembangunan yang ada di lingkup pemerintahan Kota Pagar Alam.

2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kota Pagar Alam menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama dengan Surat Keputusan Kepala Inspektorat Kota Pagar Alam Nomor 055 Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 1  
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET		
				2013	2014	2015
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam	1.1.1 Persentase aparat pengawasan yang mengikuti pelatihan	INSPEKTUR	25 %	35 %	50 %
		1.1.2 Persentase aparatur pengawasan yang sudah mengikuti jenjang jabatan fungsional auditor		25 %	40 %	55 %
		1.1.3 Persentase jumlah sarana dan prasarana penunjang		15 %	25 %	70 %
		1.1.4 Jumlah dokumen/laporan		15 %	25 %	45 %
		1.1.5 Persentase program percepatan pemberantasan korupsi		20 %	35 %	55 %
		1.1.6 Persentase jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan review		35 %	55 %	60 %
		1.1.7 Persentase PNS yang disiplin		25 %	40 %	50 %

		1.1.8 Persentase Kinerja Aparatur		30 %	40 %	50%
		1.1.9 Persentase pelayanan aparatur		40 %	40 %	50 %

## 2.2. Rencana Strategis

### a. VISI

Visi Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam yang sudah ditetapkan berdasarkan aspirasi dan partisipasi seluruh pejabat dan staf Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam yang mendukung visi misi Kota Pagar Alam :

***“Terwujudnya Visi Pemerintahan Kota Pagar Alam yang baik, berwibawa, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui profesionalisme pengawas.”***

### b. MISI

Untuk melaksanakan Visi Insvektorat Kota Pagar Alam, diperlukan misi yang menunjang terlaksananya visi tersebut yaitu :

#### 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan.

Meningkatkan kualitas pengawasan fungsional yang professional di Inspektorat Kota Pagar Alam merupakan antisipasi untuk mengatasi beban kerja yang beragam. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas aparat pengawasan dan hasil pengawasan Inspektorat melalui pelatihan, kursus, pembelajaran dan pelatihan kantor sendiri. Sedangkan untuk peningkatan kualitas perencanaan, penyusunan standard pedoman pengawasan serta melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja Inspektorat Kota Pagar Alam secara berkala.

#### 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Sesuai dengan Norma dan Standarisasi Audit

Peningkatan manajemen Pemerintahan ini menempatkan Inspektorat Kota Pagar Alam sebagai fasilitator pembaharuan manajemen bagi unit kerja lainnya. Sebagai penguatan atas tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Pagar Alam melakukan upaya pembinaan kelembagaan, penilaian akuntabilitas kinerja, penegakan peraturan perundangan dan kerjasama ddengan aparat pengawasan fungsional lainnya dan pihak-pihak lain

dalam dalam pelaksanaan tupoksinya yang sesuai dengan norma dan standarisasi audit.

### **c. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra . adapun tujuan tersebut adalah

1. Meningkatnya Kualitas Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan norma dan standarisasi audit;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja dan Pemerintah Kota Pagar Alam;
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan masyarakat oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

### **d. SASARAN**

Sasaran Inspektorat merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan (2013-2018) melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah :

- Meningkatnya pengawasan internal secara berkala dan penyelesaian kasus pengaduan serta tindak lanjut temuan pengawasan Terlaksananya Pendidikan dan latihan audit/sertifikasi ;

### **e. PROGRAM**

Program Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam berdasarkan anggaran Tahun 2014 memiliki 7 (tujuh) program utama, yang kemudian dari tiap program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan, berikut ini Program Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; dan
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
7. Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat

**f. KEGIATAN**

Pada Tahun Anggaran 2014 sesuai dokumen pelaksanaan anggaran yang ada maka Inspektorat Kota Pagar Alam melaksanakan 7 (tujuh rogram dengan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.440.293.300,- (Satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah ) . Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
12. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
13. Pemeliharaan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
15. Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari – hari tertentu

16. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun
17. Penyusunan RKA dan DPA
18. Pelaporan Lakip
19. Penyusunan Rensra
20. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
21. Penanganan kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah
22. Tindak lanjut hasil temuan Pengawasan
23. Koordinasi Pengawasan yang lebih Konfrensif
24. Inventarisasi Temuan Pengawasan
25. Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
26. Review Laporan Keuangan Daerah
27. Penyelesaian TPKN/TPGR
28. Bimtek Pelatihan Dasar – dasar Audit
29. Bimtek Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
30. Bimtek Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
31. Pelatihan Review Laporan Keuangan
32. Bimtek Teknis Pengawasan dan Prosedur Pengawasan
33. Bimtek Evaluasi LPPD
34. Bimtek Evaluasi Lakip
35. Bimtek Rensra
36. Bimtek cara – cara Penyelesaian Kerugian Negara / TPTGR
37. Pembentukan Unit Kasus Penanganan Pengaduan Masyarakat

### **2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2014 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas Inspektorat Kota Pagar Alam sepenuhnya dapat dirujuk pada rencana kinerja 2014 ini.

Sasaran strategik tahun 2014, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2  
Rencana Kinerja Tahunan  
Tahun 2014

No	Sasaran			
	Uraian	Indikator Kerja	Satuan	Target
1.1.	Terlaksananya pendidikan dan latihan audit/ sertifikasi	Persentase Aparatur yang telah diklat		
		- Diklat dasar-dasar audit	%	100
		- Diklat reviu laporan keuangan	%	100
		- Diklat audit dan akuntabilitas	%	100
		- Diklat pengadaan barang dan jasa	%	100
		- Manajemen dan prosedur audit	%	100
1.2	Tersedianya referensi dasar-dasar audit	Persentase referensi dasar-dasar audit		
		- Undang-Undang	%	100
		- Peraturan Pemerintah	%	100
		- Keputusan Presiden	%	100
		- Keputusan Menteri	%	100
		- Peraturan Daerah	%	100
1.3	Tersedianya sarana dan prasarana audit	Persentase sarana dan prasarana		
		- Transportasi	%	100
		- Komputer/Laptop	%	100
		- Logistik pendukung audit	%	100
		- Kostum Audit	%	100
1.4	Tersedianya tenaga pengawasan lintas basic/ disiplin ilmu	Persentase basic tenaga		
		- Tenaga Pendidikan	%	100
		- Tenaga Kesehatan	%	100
		- Tenaga Teknik Sipil	%	100
		- Tenaga Teknik Lingkungan	%	100
		- Tenaga Hukum	%	100
		- Tenaga Akuntansi / Ekonomi	%	100
		- Tenaga Asset	%	100
		- Tenaga Pertanian	%	100
		- Tenaga Perkebunan / Kehutanan	%	100
		- Tenaga Pemerintahan	%	100
1.5	Terlaksananya jenjang pendidikan formal aparatur	Persentase aparatur yang ikut jenjang pendidikan		
		- Strata Satu (S-1)	%	100
		- Strata Dua (S-2)	%	100
		- Strata Tiga (S-3)	%	100
		- Kursus Audit	%	100

2.1	Terlaksananya pengawasan atas SKPD Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase jumlah SKPD yang diawasi		
		- SETDA dan SETWAN	%	100
		- Dinas-Dinas Daerah	%	100
		- Lembaga Teknis Daerah	%	100
		- Institusi Pendidikan	%	100
		- Pemerintah Kecamatan	%	100
		- Pemerintah Kelurahan	%	100
2.2.	Meningkatnya koordinasi horizontal dan vertikal	Persentase koordinasi		
		- Koordinasi Horizontal	%	100
		- Koordinasi Vertikal	%	100
2.3	Terlaksananya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti		
		- SETDA	%	100
		- SETWAN	%	100
		- Dinas-Dinas	%	100
		- Badan	%	100
		- Kantor	%	100
		- UPTD	%	100
- Institusi Pendidikan	%	100		
2.4	Meningkatnya sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan		
		- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Paket	1
		- Laporan Keuangan Semester	Paket	2
		- Laporan Keuangan Akhir Tahun	Paket	1
2.5	Terlaksananya intensifikasi pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat		
		- Pembentukan unit kasus penanganan pengaduan masyarakat	Paket	4
		- Penanganan kasus pengaduan masyarakat	%	100
		- Pengaduan kasus wilayah pemerintah bawah	%	100
2.6	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Persentase pelaksanaan pengawasan		
		- Pengawasan pelaksanaan internal secara berkala	Paket	4
		- Evaluasi berkala hasil pengawasan	Paket	4
		- Reviu laporan keuangan daerah	Paket	1
		- Monitoring pengendalian dan evaluasi kegiatan	Paket	1
		- Koordinasi pengawasan komprehensif	Paket	1
		- Intervensi temuan pengawasan	Paket	1

## 2.4 Penetapan Kinerja

Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2014 mengacu pada RKT tahun 2014. Secara garis besar Penetapan Kinerja tahunan 2014 meliputi 1 (satu) sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 6 (enam) indikator kinerja targetnya yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3  
Penetapan Kinerja (TAPKIN)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya pengawasan internal secara berkala dan penyelesaian kasus pengaduan serta tindak lanjut temuan pengawasan	Persentase pengawasan internal secara berkala dan penyelesaian kasus pengaduan serta tindak lanjut temuan pengawasan	100%	Program peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	840.680.000,-
		Penyelesaian pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1 Paket	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	608.720.000,-
		Penyelesaian penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	5 Kasus	Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	63.000.000,-
		Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan	8 Laporan	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	59.886.000,-

		Penyelesaian Review Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan	Review laporan keuangan daerah	46.050.000,-
		Penyelesaian TPKN/TPTGR	8 Kali	TPKN/TPTGR	63.024.000,-

Jumlah Seluruh Anggaran : Rp. 1.400.293.300,-

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggung jawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi an dan program / kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Peran Inspektorat Kota Pagar Alam dalam mendukung pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good govermence). Dalam rangka mewujudkan eksistensi lembaga pengawasan tersebut, Inspektorat Kota Pagar Alam telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun1999 dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor. 239/iX/6/8/2013 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasareksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### 3.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4  
Pencapaian IKU

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2014	Realisasi %	Ket
Meningkatnya pengawasan internal secara berkala dan penyelesaian kasus pengaduan serta tindak lanjut temuan pengawasan	Persentase pengawasan internal secara berkala dan penyelesaian kasus pengaduan serta tindak lanjut temuan pengawasan	%	100		
	Penyelesaian pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Kali	4	99,28%	Jumlah Terlaksananya Pengawasan secara berkala dibagi Jumlah dana keseluruhan Pengawasan kali 100%
	Penyelesaian penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kasus	21	93,19%	Jumlah kasus pengaduan yang ditangani
	Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kali	4	92,47%	Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawasan
	Penyelesaian Review Laporan Keuangan Daerah	Kali	1	100%	Jumlah penyelesaian review Laporan Keuangan
	Penyelesaian TPKN/TPTGR	Kasus	20	82,54%	Penyelesaian TPKN/TPTGR







### 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

No	Indikator Kinerja Hasil (Outcomes)	Satuan	Target 2014	Capaian Hasil	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	3.834.000,-	99,22%
2	Terpenuhinya Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	1	1	8.113.4400,-	77,21%
3	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan	Unit	11	11	4.385.000,-	99,66%

	Perlengkapan Kantor					
4	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	9	8	13.840.000,-	90,46%
5	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	bulan	12	12	66.050.000,-	85,34%
6	Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12	12	68.172.900,-	99,25%
7	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Bulan	12	12	12.815.400,-	99,72%
8	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	6.789.000,-	99,69%
9	Tersedianya Persediaan peralatan rumah tangga	Paket	1	1	6.906.000,-	99,90%
10	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Macam	4	4	5.640.000,-	62,67%
11	Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	kali	43	43	246.264.000,-	100%

Pencapaian kinerja untuk program ini memiliki 11 (sebelas) indikator kinerja yang berasal dari indikator outcomes kegiatan yang berada di program ini. Capaian kinerja program ini keseluruhannya mencapai 93 persen, hal ini disebabkan pencapaian kinerja per kegiatan dapat terealisasi seluruhnya baik indikator input, output maupun outcomesnya.

## 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Capaian Indikator Kinerja Program ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Hasil (Outcomes)	Satuan	Target	Capaian Hasil	Realisasi(Rp)	% Capaian
1.	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	9	9	13.840.000,-	90,46%

Capaian satu (1) dari dua (2) indikator kinerja program ini menunjukkan pencapaian optimal yaitu Indikator nomor 2, namun Indikator nomor 1 mencapai 90,46 %

### 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Capaian Indikator Kinerja Program ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Hasil (Outcomes)	Satuan	Target	Capaian Hasil	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Orang	43	43	17.200.000,-	100%

### 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian Indikator Kinerja Program ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Hasil (Outcomes)	Satuan	Target	Capaian Hasil	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Penyusunan RKA dan DPA	Dokumen	2	2	3.001.600,-	100%
2	Penyusunan Lakip SKPD	Dokumen	2	2	2.994.000,-	99,75%

Program ini memiliki capaian indikator kinerja optimal, seluruh indikator kinerja dapat terealisasi dengan tingkat capaian 99,75%, adapun penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut

- 1) Indikator kinerja hasil berupa dokumen yang menjadi acuan penilaian kinerja merupakan indikator outcome yang berasal dari kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang memuat beberapa sub kegiatan yang outputnya merupakan dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan penilaian kinerja, dokumen tersebut berupa :
  - 2 (dua) dokumen RKA Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
  - 2(dua) dokumen DPA Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
  - 2(dua) dokumen LAKIP Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014;
  - 1 (satu) dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
  - 1 (satu) dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2018 Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;

- 1 (satu) dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014 Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) dokumen Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2014 Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;

## 5. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Capaian Indikator Kinerja Program ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Hasil (Outcomes)	Satuan	Target	Capaian Hasil	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pelaksanaan internal secara berkala	kali	4	4	604.325.000,-	99,28%
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah	kasus	21	21	58.710.000,-	93,19%
3	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kali	4	4	55.376.000,-	92,47%
4	Reviu laporan keuangan Daerah	Kali	1	1	46.050.000,-	100%
5	Penyelenggaraan TPKN /TPTGR	kasus	20	20	52.017.600,-	82,54%

Program ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja yang seluruh tingkat capaian kinerjanya berkisar antara 82,54% sampai dengan 100% dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Indikator Dokumen yang menjadi bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan merupakan outcome dari kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Targetnya 4 (empat) laporan, yaitu merupakan jumlah seluruh laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang ada di program kerja pengawasan tahunan (PKPT) Tahun 2014. Realisasi indikator kinerja ini sebanyak 4 laporan atau sebesar 100%.
- 2) Indikator Dokumen yang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya merupakan outcome dari kegiatan penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Target sebanyak 21 (Dua puluh satu) laporan/nota dinas yang didapat dari seluruh penanganan informasi/pengaduan yang dilakukan pemeriksaan khusus/kasus. Sepanjang tahun 2014 Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam menerima 4 pengaduan dari jumlah tersebut berdasarkan substansi pengaduan dilakukan 4 pemeriksaan khusus dikoordinasikan dengan pihak terkait. Dari 4 pemeriksaan khusus/kasus tersebut seluruhnya telah dibuatkan

laporan/nota dinas kepada pihak atasan untuk diproses lebih lanjut. Pencapaian indikator ini mencapai 100%.

- 3) Indikator Data/Informasi perkembangan percepatan pemberantasan korupsi merupakan outcome dari kegiatan penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya dengan sub kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Target kegiatan ini ditetapkan 5 laporan karena Laporan pelaksanaan Inpres di buat persemester berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : B/345/M.PAN/2/2005 tanggal 22 Februari 2005 Perihal Pelaporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Capaian kinerja indikator ini adalah 100%.
- 4) Indikator “Dokumen acuan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan kebijakan selanjutnya” merupakan outcome dari kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan/pelaksanaan evaluasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler. Target indikator ini adalah sebanyak 8 laporan yang berasal dari jumlah surat tugas evaluasi tindak lanjut yang dikeluarkan sepanjang tahun 2014. Capaian indikator kinerja ini sebesar 100% yang berarti realisasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah sebesar 8 LHE.
- 5) Indikator Laporan/Informasi untuk perbaikan disiplin dan pelayanan masyarakat merupakan outcome dari kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu : koordinasi pengawasan, penyusunan bahan rakorwas pemutakhiran data Itjen, evaluasi sistem waskat dan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak). Outcomes kegiatan ini menargetkan 1 laporan yang dapat dijadikan sebagai bahan/informasi perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat.  
Pencapaian indikator kinerja ini sebesar 100%, yaitu laporan/informasi untuk perbaikan disiplin dan pelayanan masyarakat seluruhnya berhasil direalisasikan.
- 6) Indikator “Temuan yang diselesaikan tindaklanjutnya” merupakan outcome dari kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan/koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat eksternal. Indikator ini menargetkan seluruh temuan pemeriksaan aparat eksternal

diselesaikan tindaklanjutnya sesuai rekomendasi. Selama tahun 2014 temuan aparat pengawasan eksternal tersebut sebanyak 8 temuan dan realisasi tindaklanjut atas temuan tersebut sebanyak 8 temuan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%

### **1. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**

Capaian Indikator Kinerja Program ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Hasil (Outcomes)	Satuan	Target	Realisasi(Rp)	% Capaian
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan	kali	1	40.764.000,-	100%

Program ini memiliki capaian indikator kinerja optimal, seluruh indikator kinerja dapat terealisasi dengan tingkat capaian 100%.

### **3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategik**

Perumusan sasaran strategik Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam sejalan dengan penetapan Indikator Kinerja Kunci Utam (IKU) Kota Pagar Alam yang ada di pemerintahan umum, adapun pencapaian kinerja sasaran tersebut Sasaran Strategisut adalah sebagai berikut Pencapaian kinerja sasaran strategik di atas dengan penjelasan sebagai berikut



Tabel Realisasi Program Kegiatan Tahun 209 s.d 2014

No	Program dan Kegiatan	Realisasi Program dan Kegiatan										
		2009			2010			2011			2012	
		Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%	Rencana	R
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	321.463.500	435.000.000	280.347.500	64,7	281.095.000	-	0	592.518.000	589.324.000	94,46	706
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	200.000.000	172.347.500	86,7	181.312.500	166.237.500	91,68	504.448.000	503.824.000	99,896	570.080.000	520
2.	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	10.000.000	-	0	17.250.000	-	0	30.870.000	30.805.000	99,789	41.130.000	30.
3.	Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah Daerah	15.000.000	-	0	-	-	0	-	-	0	-	
4.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK	10.000.000	-	0	16.475.000	-	0	12.200.000	12.173.000	99,778	61.080.000	38.
5.	Reviu laporan keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komperendif	30.000.000	30.000.000	100	-	-	0	-	-	09	-	
7.	Insventarisasi Temuan Pengawasan	10.000.000	-	0	-	-	0	-	-	0	-	
8.	Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	75.000.000	9.360.000	16,8	23.100.000	-	0	-	-	0	-	
9.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	10.000.000	-	0	-	-	0	-	-	0	-	
10.	Review Capaian Keuangan Daerah	75.000.000	68.640.000	91,52	42.957.500	42.957.500	100	45.000.000	42.522.000	94,493	34.000.000	34.
11.	Kelompok Kinerja LHKPN	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	
12.	Penyusunan Penyelesaian TPKN/TPPTGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

### 3.3. Aspek Penunjang

#### 1. Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam untuk mencapai tujuan sasaran pada Tahun Anggaran 2014 telah dianggarkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 sebesar Rp. 3.824.273.300,- dengan persentase realisasi 81,35%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai DPA	Realisasi DPA	%
1	Jumlah Belanja Tidak Langsung	2.423.980.000,-	1.972.002.359,-	81,35%
2	Jumlah Belanja Langsung Pegawai	31.440.000,-		
3	Jumlah Belanja Langsung Barang dan Jasa	1.368.853.300,-		
	<b>Jumlah</b>	<b>3.824.273.300,-</b>		

Pelaksanaan aspek-aspek keuangan yang meliputi segi penggunaan, pembukuan dan pelaporannya telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Personalia/Sumaber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam per 31 Desember 2014 berjumlah 47 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, pendidikan, dan diklat kompetensi auditor pemerintah/diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dapat dilihat pada tabel berikut :

##### a. Berdasarkan Golongan

<b>Golongan</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>Jumlah</b>
I	-	-	-	-	-
II	1	2	-	1	4
III	19	5	9	4	37
IV	4	1	1	-	6
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>47</b>

##### b. Berdasarkan Jabatan

Guna merespon tuntutan Peraturan Pemerintrah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam

bersama DPRD Kota Pagar Alam telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam.

Berdasarkan ketentuan diatas, Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam mengalami perubahan kedudukan dan struktur organisasi, utamanya untuk jabatan struktural eselon III dan IV, berikut ini perbandingan jabatan struktural Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam setelah pelaksanaan Perda tersebut :

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jumlah</b>
1	Inspektur	II.b	1
2	Sekretaris	III.a	1
3	Irban Wilayah	III.a	4
4	Kasubbag	IV.a	3
5	Kasi	IV.a	11
6	Staf	-	27
<b>Jumlah</b>		-	<b>47</b>

c. Berdasarkan Pendidikan

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Strata Dua (S.2)	4
2	Strata Satu (S.1)	35
3	Diploma Tiga (D.III)	3
4	SLTA/Sederajat	4
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam tahun 2014 berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis pencapaian strategik yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman rumusan sasaran yang didukung indikator setingkat outcome dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari 7 (tujuh) sasaran yang dijabarkan dalam 5 (lima) program dengan indikator kinerja sebanyak 34 indikator yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2014-2018, dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 86,60%. Bila dinilai dengan skala ordinal berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 dikategorikan sangat baik.

Capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam sebagian besar telah menunjukkan hasil optimal, yaitu :

1. Sasaran strategik “Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam” dengan indikator kinerjanya “Ketersediaan aparatur pengawasan yang kompeten” capaian kinerjanya 95,74% dari target yang ditetapkan 100%.
2. Sasaran strategik “Adanya pedoman dalam penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan” dengan indikator kinerjanya “Ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan” capaian kinerjanya 100%, hal ini berasal dari jumlah standar operasional dan prosedur (SOP) pengawasan yang direncanakan setiap tahun terpenuhi sebanyak 2 SOP.
3. Sasaran strategik “Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku pada setiap SKPD sesuai dengan DPA”. Dengan indikator kinerja sasaran “Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku” capaian kinerjanya 98%.
4. Sasaran strategik “Meningkatkan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat baik yang berasal dari kotak pengaduan, media massa & pelimpahan pihak atasan”, dengan indikator kinerja sasaran “Tingkat penyelesaian kasus pengaduan masyarakat” capaian kinerjanya 99%.

angka ini didapat dari seluruh pengaduan/informasi yang masuk telah ditindaklanjuti/diproses baik yang dikeluarkan penugasan khusus/kasus maupun yang dikoordinasikan dengan pihak terkait.

5. Sasaran strategik “Penyelesaian temuan pemeriksaan BPK di Pemkot Pagar Alam sesuai dengan rekomendasi” dengan indikator kinerja “Tingkat temuan BPK yang ditindaklanjuti” capaian kerjanya adalah 98%.

#### **4.2 KENDALA YANG DIHADAPI**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran serta perumusan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan dan kesadaran aparatur pelayanan publik masih rendah;
2. Disiplin Aparatur perlu ditingkatkan;
3. Masih ada unit pelayanan yang belum mensosialisasikan standar pelayanan prima, yakni dengan membuat skema alur pelayanan, prosedur dan biaya pelayanan yang transparan;
4. Adanya ketidaksesuaian kegiatan dengan program di Dokumen pelaksanaan anggaran sehingga dalam perumusan sasaran seringkali program dan kegiatan tersebut berbaur untuk mencapai sasaran tertentu.
5. Masih kurangnya jumlah dan Kualitas SDM masyarakat

#### **4.3 LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF**

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pagar Alam dalam upaya meningkatkan kerjanya antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan internal tahunan Inspektorat Kota Pagar Alam memfokuskan kepada program-program prioritas yang berkesinambungan dan sesuai visi dan misi, sehingga program tersebut dapat memacu terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik;
2. Meningkatkan fungsi perencanaan sehingga penetapan target sasaran dilakukan dengan cermat dan rasional diikuti dengan strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mengevaluasi dan menganalisis setiap tahapan kegiatan sehingga hasil analisis dapat digunakan dalam pengendalian pelaksanaan dan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, hambatan pelaksanaan secara dini dapat diketahui dan diatasi sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Inspektorat Kota Pagar Alam sebagai lembaga kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan kota harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal yang memiliki integritas, visioner, profesional, amanah dan tidak cacat moral;
5. Inspektorat Kota Pagar Alam harus memiliki finansial anggaran yang optimal yaitu satu persen (1 %) dari APBD hal ini sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor Tahun 2009
6. Mengupayakan jumlah standar Auditor agar mencapai 40 Orang ditahun – tahun mendatang

